

PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEBU DI MANGKUNEGARAN TAHUN 1918-1937

THE DEVELOPMENT OF SUGAR CANE PLANTATION ON MANGKUNEGARAN IN 1918-1937

Oleh: Salma Abidah, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, salmaabidah34@gmail.com

Abstrak

Perkebunan telah ada sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara. Perkembangan perkebunan lahir setelah bangsa Belanda datang ke Nusantara dan menjajah. Perkebunan telah menyebar ke seluruh wilayah Hindia Belanda tak terkecuali di Praja Mangkunegaran. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan perkebunan tebu di Mangkunegaran pada tahun 1918 hingga tahun 1937. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Terdiri dari; heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan tebu Mangkunegaran merupakan perkebunan penghasil bahan baku untuk PG Colomadu dan PG Tasikmadu. Pada tahun 1918 hingga tahun 1929 perkebunan tebu Mangkunegaran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan perluasan perkebunan tebu dan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak. Namun, pada tahun 1930 merupakan puncak krisis Melaise yang melanda seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah Mangkunegaran. Pemerinah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap industri gula di Hindia Belanda. Menghadapi krisis Melaise dan untuk mencegah terjadinya kegurian, pihak Mangkunegaran mengurangi lahan perkebunan tebu, dan mengganti bibit tebu yang digunakan menggunakan varietas POJ 2878 yang lebih unggul dari pada varietas lainnya.

Kata Kunci: Mangkunegaran, perkebunan, tebu.

Abstract

By : Salma Abidah, Study Program of History Science, Faculty of Social Science, Yogyakarta State University, salmaabidah34@gmail.com

Abstract

Plantation has been prevailed since the invasion of Europe in Nusantara. It had been developed since Dutch East Indies came to invade Nusantara. It had been spread to all invaded region including Praja Mangkunegaran. The purpose of this research is to uncover the development of sugar cane plantation on Mangkunegaran in 1918-1937. The research employs research method of critical history research. It consists of heuristic, source critics, interpretation, and historiography. The research results indicate that sugar cane plantation on Mangunegaran is the main supplier of Colomadu and Tasikmadu Sugar Mill. In 1981 to 1929 the plantation was well developed swiftly. It was indicated with farmland expansion and increasing labor. However, in 1930 Melaise crisis affected Dutch East Indies territories including Mangkunegaran. Dutch East Indies released new policies about sugar industry. As a result, Mangkunegaran decreased farmland and changed the sugar cane seeds with higher quality, variety of POJ 2878, in order to prevent deprivation.

Keywords: Mangkunegaran, plantation, sugar cane

A. Pendahuluan

Perkebunan hadir sebagai perpanjangan tangan dari perkembangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan hadir sebagai sistem perekonomian baru yaitu dari sistem perekonomian pertanian biasa yang hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari menjadi sistem perekonomian pertanian komersial yang memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pendapatan lebih dari sektor pertanian.¹ Di dunia pertanian, perkebunan sering disebut “pabrik” pertanian.² Penyebutan tersebut dikarenakan pada proses memproduksi yang menghasilkan komoditi perkebunan sama-sama menggunakan alat produksi maupun pertanian dan manajemen perkebunan maupun pabrik.

Perkembangan perkebunan di Indonesia dapat dilihat dari masa sebelum kedatangan bangsa Eropa. Setelah Belanda mendirikan VOC, produksi komoditas ekspor dipantau oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu masyarakat Nusantara mengenal sistem komersialisasi perkebunan. Setelah Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris dan menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Raffles membawa sistem baru bagi perkebunan Hindia Belanda yaitu sistem sewa tanah. Melalui sistem ini tanah-tanah di Hindia Belanda disewakan kepada para pengusaha perkebunan.³ Setelah kekuasaan pemerintah Inggris di Hindia Belanda direbut kembali oleh pemerintah Belanda, sistem sewa tanah tetap dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan akibat kekosongan kas negara, pemerintah Hindia Belanda mencetuskan sistem tanam paksa.

Tidak sampai disitu, perkembangan penting dari perkebunan di Hindia Belanda terjadi pada tahun 1870, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau *Agrarische Wet 1870* untuk menjelaskan tentang hukum-hukum pertanahan dan kepemilikan tanah di Hindia Belanda. Setelah dikeluarkannya *Agrarische Wet* pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mengusulkan dilaksanakannya reorganisasi agraria. Tujuan lain diadakannya reorganisasi agraria adalah untuk mengintegrasikan tanah-tanah yang terpecah dan terpotong-potong menjadi sebuah areal perkebunan yang luas.⁴ Di Praja Mangkunegaran, reorganisasi agraria telah dilakukan sejak pemerintahan Mangkunegoro IV yaitu dengan menghapus sistem *apanage* yang dikelola

¹Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 1.

²Mubyarto, dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 3.

³ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm. 47.

⁴Suhartono, *Apanage dan Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 96.

oleh *bekel* sebagai abdi dalem Praja Mangkunegaran menjadi sistem upah⁵. Sebelum dihapusnya sistem *apanage*, para abdi dalem Praja Mangkunegaran di upah dengan diberi tanah untuk digarap dan hasil dari tanah tersebut menjadi upah bagi abdi dalem Praja Mangkunegaran. Secara formal reorganisasi agraria dilaksanakan di Surakarta dan Mangkunegaran dimulai pada tahun 1912 sampai tahun 1926. Reorganisasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadikan tanah-tanah di Praja Mangkunegaran semakin jelas kepemilikannya, baik tanah yang menjadi milik Praja Mangkunegaran dan diolah sendiri maupun tanah yang diserahkan kepada desa-desa dan menjadi tanah desa.

Pada masa tanam paksa dimulai, penanaman tebu di wilayah Mangkunegaran sudah mulai banyak dilakukan dengan diorganisasikan oleh penguasa lahan dan dibantu beberapa pegawai serta buruh yang seluruhnya disebut dengan istilah perkebunan tebu. Setelah adanya perkebunan tebu, Mangkunegoro IV berencana untuk mendirikan pabrik gula. Mangkunegoro IV mengajukan proposal kepada Pemerintahan Hindia Belanda dengan dukungan Residen Surakarta, akhirnya pada akhir tahun 1861 mulai dibangun PG Colomadu untuk pertama kalinya di wilayah Mangkunegaran. Dan pada tahun 1971 Mangkunegoro IV mendirikan pabrik gula kedua yang diberi nama PG Tasikmadu.

B. Mangkunegaran Pada Masa Mangkunegoro VII Tahun 1916-1944

Praja Mangkunegaran merupakan kerajaan kecil yang berdiri setelah ditanda tanganinya perjanjian Selatiga dengan pemimpinnya bergelar Mangkunegoro. Wilayah Praja Mangkunegaran terdiri dari 3 distrik *onderregenttschap*, yaitu *Onderregenttschap* Kota Mangkunegaran, *Onderregenttschap* Karang Anyar, dan *Onderregenttschap* Wonogiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa wilayah kekuasaan Mangkunegaran timur berbatasan dengan gunung Lawu, sebelah selatan berbatasan dengan laut selatan, barat berbatasan dengan wilayah Kesunanan Surakarta dan Yogyakarta, dan barat berbatasan dengan wilayah kekuasaan Kolonial Belanda.

Pada awal berdirinya, tanah Praja Mangkunegaran adalah tanah yang diberi Sunan kepada Mangkunegoro I sebanyak 4000 *cacah*. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1792, setelah ditanda tanganinya “Perjanjian Jamina” tanah Mangkunegaran dapat diwariskan turun temurun kepada penerus keluarga Mangkunegaran. Permulaan abad ke 19 di Surakarta banyak terdapat perusahaan swasta yang menanam modal maupun mendirikan perusahaan perkebunan.⁶ Pada saat penguasaan Mangkunegoro IV, beliau mengajukan rencana pembangunan pabrik gula. Langkah awal yang diambil oleh Mangkunegoro IV adalah menyiapkan lahan perkebunan tebu dengan dengan tidak memperpanjang kontrak-kontrak sewa tanah

⁵M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 276.

⁶Suhartono, *op.cit.*, hlm. 29.

yang sudah berlangsung di tahun 1859 dan 1860 dan menarik tanah *lungguh* yang ada. Pada tahun 1960 Mangkunegoro IV mengajukan proposal rencana pembuatan pabrik gula kepada residen Niewenhuysen dan gubernur Hindia Belanda untuk menyetujuinya.

Pembangunan PG Colomadu diawali dengan peletakan batu pertama untuk “Colomadu” pada 8 Desember 1861.⁷ Colomadu berasal dari bahasa Jawa yang berarti “gunung madu” terdapat di bagian barat wilayah Praja Mangkunegaran yang beroperasi mulai tahun 1861.⁸ Pemberian nama Colomadu mengandung suatu harapan agar kehadiran pabrik gula ini menjadi simpanan kekayaan Praja Mangkunegaran dalam bentuk butiran gula pasir yang berjumlah besar hingga menyerupai gunung.⁹ Hasil pencapaian gula dari PG Colomadu yang cukup memuaskan dan membuat Mangkunegoro IV terdorong untuk membangun pabrik gula kedua. Pabrik gula kedua diberi nama “Tasikmadu” yang dalam bahasa Jawa berarti “lautan madu” dan dibangun di desa Sandakara, Distrik Karanganyar.¹⁰ Peletakan batu pertama PG Tasikmadu dilaksanakan pada 11 Juni 1871 yang juga menandai pembangunan pabrik gula tersebut. Pembangunan PG Tasikmadu ditangani oleh H. Kamp. Pabrik gula Tasikmadu memiliki gedung-gedung yang dibangun sangat luas dan hanya sedikit yang dapat menyamainya.

Pada 3 Maret 1916 B.R.M. Soejo Soepartodilantik sebagai penguasa baru Mangkunegaran dengan gelar Pangeran Adipati Arya Prangwedono¹¹ untuk menggantikan ayahnya yaitu Mangkunegoro VI yang mengundurkan diri dari jabatannya. Gelar Prangwedono didapat karena Soeparto belum genap berusia 40 tahun. Tepat pada tahun 1924, Soeparto genap berusia 40 tahun, selanjutnya Soeparto di kukuhkan dan dilantik sebagai K.G.P.A.A. Mangkunegoro VII. Pengukuhan dan pelantikan Soeparto sebagai K.G.P.A.A. Mangkunegoro VII menjadikan kebijakan yang dikeluarkan Soeparto semakin kuat dengan kedudukan yang disandangnya itu.

Pada saat Mangkunegoro VII menjabat, beliau dikenal sebagai “Mangkunegoro Kalen” karena tindakan dalam menertibkan penggunaan fungsi sungai, dengan cara membangun WC umum dan kamar mandi umum. Selain itu Mangkunegoro VII juga membangun 19 poliklinik, sebuah rumah sakit, menyumbangkan tanah

⁷Soetomo Sisiwokartono, *Sri Mangkunegaran IV Sebagai Penguasa dan Pujangga (1853-1881)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), hlm. 19.

⁹Diyah Wahyuningsih dan Septi Waryani, *Sejarah Perkebunan Gula Jawa Tengah*, (Semarang: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2016), hlm. 95.

¹⁰Mahesti Hasanah, *Ekonomi Politik Kolonialisme: Prespektif Kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Hindia Belanda dalam Mengelola Industri Gula Mangkunegaran Pada Tahun 1870 -1930*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), hlm. 39.

¹¹Heri Wiryawan, *Mangkunegaran VII dan Awal Penyiaran Indonesia*, (Surakarta: Lembaga Pers dan Penyiaran Surakarta, 2011), hal 51.

untuk dibuat sekolahan, mengaspal jalan, membangun jembatan dan lapangan, memperluas pasar Legi dengan ditambahkan fasilitas bagi pedagang dari Surabaya dan Semarang. Membangun perumahan bagi para abdi dalem dan bagi masyarakat umum. Mengembangkan wisata di daerah Karanganyar.¹² Dibiidang politik Mangkunegoro VII mengikuti organisasi Budi Utomo, SI, dan ISDV. Hal ini dilakukan karena Mangkunegoro VII tidak bisa berpihak kepada Belanda atau sering disebut dengan antek Belanda seperti halnya Paku Buwono II. Mangkunegoro VII memilih untuk berdiri sendiri dan memikirkan nasib rakyatnya dan tidak berkonfrontasi dengan Belanda. Selain itu pada tahun 1930-an, Mangkunegoro VII melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang lahir di Istana Mangkunegaran dengan dipimpin langsung oleh Mangkunegoro VII dan ditopang oleh teknologi komunikasi modern yaitu teknologi penyiaran radio.

C. Perkebunan Tebu Di Mangkunegaran Tahun 1918-1937

Sebelum dilaksanakannya reorganisasi agraria di Praja Mangkunegaran tahun 1918, lahan perkebunan tebu di Praja Mangkunegaran seluas 1766,81 ha, dengan rincian pada tahun 1917 PG Tasikmadu memiliki lahan seluas 1028 ha. Dibandingkan tahun 1911, PG Tasikmadu yang masih memiliki lahan perkebunan tebu seluas 693 ha, maka luas lahan perkebunan tebu tersebut mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 1,5 kali lipat dari awalnya. Di PG Colomadu pada tahun 1904 memiliki beberapa lahan perkebunan dengan jumlah 1806 bahu ditambah 1723,15 roed¹³. Setelah dilaksanakan reorganisasi agraria, beberapa lahan perkebunan tebu yang disewa oleh Mangkunegaran tidak diperpanjang lagi masa sewanya. Pada tahun 1918 sampai 1928 luas lahan perkebunan tebu di Mangkunegaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan puncaknya pada tahun 1929 dengan luas lahan perkebunan yang dipanen seluas 1187,47 ha. Perbedaan luas lahan perkebunan tebu yang dicapai oleh PG Colomadu dan PG Tasikmadu memang sangat berbeda jauh. Hal tersebut dikarenakan ekspansi perluasan lahan perkebunan untuk PG Colomadu mengalami kendala karena wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Surakarta dan Kartasura yang berkembangnya menjadikan wilayah disekitar PG Colomadu menjadi wilayah berpenghuni. Dapat disimpulkan bahwa wilayah perkebunan PG Tasikmadu lebih berkembang daripada wilayah perkebunan di PG Colomadu.

Pada awal tahun 1917 kesulitan mencari tenaga kerja juga dialami oleh industri gula Mangkunegara. Untuk menanggulangi hal tersebut, manajemen industri gula Mangkunegaran mendatangkan buruh dari luar Praja Mangkunegaran. Bekerja bebas dan buruh upah untuk PG Colomadu, buruh bebas dari

¹²*Ibid.*, hlm. 66.

¹³Hitungan dalam pertanian, 1 roed (Rhineland) sama dengan 3,7674 meter. J.S. Furnivall, *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*, Terj, Jakarta : Freedom Institute, 2009.

Tabel. 1
Luas areal perkebunan yang dipanen tahun 1918-1937
(dalam hektar)

Tahun	Tasikmadu			Colomadu		
	Tanaman Sendiri	Membeli Tebu	Total	Tanaman Sendiri	Membeli Tebu	Total
1918	1121,45	312,84	1436,29	645,36	X	X
1919	1145,87	267,84	1413,71	660,68	X	X
1920	1162,59	212,86	1375,25	728,10	22,71	750,81
1921	1275,57	166,69	1442,26	778,27	164,64	942,91
1922	1325,56	177,77	1443,33	767,34	55,99	823,34
1923	1232,84	125,86	1358,70	1002,45	-	1002,45
1924	1433,94	30,51	1463,85	1071,28	-	1071,28
1925	1761,95	39,67	1801,62	1086,56	-	1086,56
1926	1974,21	24,84	1999,05	1027,20	-	1027,20
1927	2105,40	14,19	2119,59	1014,17	-	1014,17
1928	2192,78	21,29	2214,07	1067,47	-	1067,47
1929	2526,94	43,28	2570,22	1187,47	-	1187,47
1930	2429,28	29,09	2458,37	1151,93	-	1151,93
1931	2490,-	4,30	2494,30	1165,57	-	1165,57
1932	2236,77	4,30	2241,07	1022,66	-	1022,66
1933	1694,70	-	1694,70	800,-	-	800,-
1934	1835,60	-	1835,60	829,-	-	829,-
1935	1799,20	-	1799,20	802,35	-	802,35
1936	-	-	-	1522,65	-	1522,65
1937	1550,-	-	1550,-	1035,19	-	1035,19

Sumber: A.K Pringgadigdo, *Geschiedenis Der Ondernemingen Van Het Mangkoenagorosche Rijk*, a.b. Muhammad Husodo Pringgokusumo, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, (Solo: Rekso Pustoko – Mangkunegaran, 1987), hlm. 120.

luar umumnya berasal dari Klaten, Boyolali, Sukaharja. Sementara itu buruh bebas dari luar pada Colomadu berasal dari Jumapala, Jatipura, Karang Pandan, dan Sragen. Sebagian besar dari mereka berjenis kelamin laki-laki dan menginap di rumah-rumah penduduk sekitar pabrik gula.¹⁴

Tenaga kerja di dalam perkebunan tebu di Mangkunegaran terbagi menjadi pegawai perkebunan dan buruh perkebunan. Pegawai perkebunan tebu di Mangkunegaran terbagi menjadi pegawai administrasi, inspektur, dan pengurus kebun.¹⁵ Tenaga kerja di perkebunan tebu milik Mangkunegaran digolongkan sesuai

¹⁴Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 93.

¹⁵*Arsip Mangkonegara VII* (Koleksi Mangkunegara). Berisi tentang peraturan gaji pegawai perkebunan, Surakarta: Rekso Pustaka.

dengan keterampilan yang dimilikinya, yaitu buruh tetap dan buruh tidak tetap. Tenaga tidak tetap dibagi menjadi buruh kampanye, musiman, dan harian.

Zaman melaise atau zaman meleset merupakan keadaan dimana ekonomi di dunia mengalami penurunan, atau di dunia internasional zaman melaise disebut dengan krisis ekonomi dunia. Krisis ekonomi dunia berawal dari Perang Dunia I yang memutuskan hubungan dagang diantara negara-negara di dunia. Selain itu kemerosotan ekspor di wilayah Eropa menjadi salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi di dunia yang mengakibatkan banyak investor melarikan dananya ke Amerika.¹⁶ Suku bunga bank di Amerika naik 4,06% per tahun menjadi 7,6% per tahun pada tahun 1927 karena untuk menghindari inflasi dengan menekan peredaran uang di masyarakat.

Tabel 2
Jumlah Tebu yang digiling oleh pabrik gula Mangkunegaran tahun 1918-1937
(dalam kuintal)

Tahun	Colomadu			Tasikmadu		
	Tebu tanaman sendiri	Membeli Tebu	Jumlah	Tebu tanaman sendiri	Membeli Tebu	Jumlah
1918	715.707,9	7.856,6	723.564,5	1.136.218,9	189.145,9	1.325.364,8
1919	657.972,8	1.892,3	659.865,1	1.080.155,-	141.849,6	1.221.964,6
1920	640.426,4	11.839,6	652.266,-	911.769,1	88.751,-	1.000.520,1
1921	583.856,1	73.430,3	667.286,4	1.030.129,7	108.873,4	1.139.003,1
1922	761.892,3	30.071,-	791.963,3	1.163.891,7	57.036,7	1.240.928,4
1923	666.781,2	-	666.781,2	1.144.611,7	91.274,5	1.255.886,2
1924	963,194,-	-	963,194,-	1.514.824,-	22.869,6	1.537.693,9
1925	1.072.491,-	-	1.072.491,-	1.824.218,-	31.203,-	1.855.421,-
1926	1.076.491,-	-	1.076.491,-	1.926.798,-	17.354,-	1.944.152,-
1927	1.099.252,-	-	1.099.252,-	2.231.777,-	12.262,-	2.244.039,-
1928	1.451.620,-	-	1.451.620,-	2.677.720,-	38.633,-	2.716.353,-
1929	1.449.967,-	-	1.449.967,-	2.425.319,-	28.342,-	2.453.661,-
1930	1.551.599,-	-	1.551.599,-	2.736.162,-	21.652,-	2.757.814,-
1931	1.542.637,5	-	1.542.637,5	2.961.925,-	3.179,-	2.965.104,-
1932	1.335,918,-	-	1.335,918,-	2.532.806,-	4.760,-	2.537.566,-
1933	989,955,-	-	989,955,-	1.744.354,-	-	1.744.354,-
1934	1,016,644,-	-	1,016,644,-	2.159.178,-	-	2.159.178,-
1935	917,773,-	-	917,773,-	2.097.375,-	-	2.097.375,-
1936	1851.385,-	-	1851.385,-	-	-	-
1937	1.428.386,-	-	1.428.386,-	1.897.377,-	-	1.897.377,-

Sumber: A.K Pringgadigdo, *Geschiedenis Der Ondernemingen Van Het Mangkoenagorosche Rijk*, a.b. Muhammad Husodo Pringgokusumo, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, (Solo: Rekso Pustoko – Mangkunegaran, 1987), hlm. 198.

¹⁶Sri Larasati, "Pengaruh Krisis Melaise Terhadap Pabrik Gula Gondang Winangun Tahun 1929-1940", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2016), hlm. 71.

Krisis ekonomi yang melanda dunia internasional juga berimbas pada wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi semakin parahnya dampak krisis ekonomi di wilayah Hindia Belanda. Zaman melaise juga berdampak pada industri gula di Praja Mangkunegaran. Harga gula yang jatuh dan kesulitan memasarkan gula di dunia internasional menjadikan pemerintah Hindia Belanda ikut campur dalam mengambil keputusan di industri gula Mangkunegaran. Ditandatanganinya Perjanjian Chadbourne mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai ekspor gula bahwa mulai tanggal 1 April 1931 penanaman tebu diseluruh wilayah Jawa dikurangi 15%.¹⁷

D. Dampak Perkebunan Tebu Di Mangkunegaran

Untuk mencegah semakin parahnya zaman melaise yang melanda Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, adalah pengalihan kepemilikan industri gula Mangkunegaran oleh Pemerintah Hindia Belanda merupakan bagian campur tangan pemerintah Hindia Belanda secara langsung dalam industri gula Mangkunegaran¹⁸, pengalihan penjualan gula kepada NIVAS (*Nederlandsch Indische Vereeniging voor de Afzet van Suiker*), dikeluarkannya kebijakan reorganisasi untuk standardisasi pemerintahan desa dan kepemilikan tanah, dan pembentukan Komisi Dana Milik Mangkunegaran, yaitu badan keuangan yang dibentuk dari adanya reorganisasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Praja Mangkunegaran. Selain itu pada 9 Mei 1929 dibentuklah Perjanjian Chadbourne yaitu perjanjian bertaraf internasional yang diterima dan disetujuinya oleh pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian Chadbourne bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara produksi dan konsumsi dengan mengatur pelaksanaan ekspor. Dari ditandatanganinya Perjanjian Chadbourne, produksi gula di Hindia Belanda turun hingga 50 %. Pada tahun 1936 Perjanjian Chadbourne berakhir.¹⁹

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda juga mendorong Mangkunegoro VII melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian yang semakin parah. Upaya yang dilakukan oleh perkebunan tebu di Mangkunegaran adalah dengan mengurangi lahan perkebunan tebu. Pengurangan lahan perkebunan tebu dinilai dari biaya produksi perkebunan yang paling besar, sehingga menghemat anggaran produksi. Wilayah yang tidak ekonomis selanjutnya dilepas. Untuk menjaga agar beberapa wilayah

¹⁷A.K. Pringgadigdo, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, a.b. Muhammad Husodo Pringgokusumo, (Solo: Rekso Pustoko – Mangkunegaran, 1987), hlm. 121.

¹⁸Mahesti Hasanah., *op.cit*, hlm. 103.

¹⁹Anonim, *Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Bidang Perekonomian*, (Jakarta; KITLV bekerjasama dengan LIPI, 1978), hlm. 43-44.

perkebunan yang tidak ditanami mengganggu dan tetap mendapat keuntungan finansial, maka wilayah yang tidak terpakai disewakan kepada rakyat. Selanjutnya, tanah-tanah yang disewa dari Sunan dikembalikan. Setelah dua tahun tanah di wilayah Jombor tidak ditanami, hak-hak konversi atas tanah tersebut dikembalikan kepada Kasunanan pada 1 April 1933.

Dari adanya perkebunan tebu di Mangkunegaran, memiliki dampak bagi masyarakat Mangkunegaran. Dampak-dampak yang berpengaruh di kehidupan masyarakat Mangkunegaran diantaranya terdapat golongan sosial yaitu *Kuli kenceng*, *Pengindung*, *Nara karya*, dan orang-orang lain, yaitu mereka belum dewasa, orang perempuan, orang cacat, dan semacamnya. Setelah reorganisasi dilakukan desa-desa di Praja Mangkunegaran lebih tertata. Dengan adanya industri gula menjadikan tingkat kesenjangan sosial meningkat. Perkebunan tebu banyak menyerap tenaga kerja, dan banyak fasilitas umum dibangun dilingkungan pabrik gula seperti sekolahan dan poliklinik.

Setelah krisis dunia melanda dan berimbas pada industri gula Mangkunegaran, terjadi pengurangan tenaga kerja. Akibatnya Lebih dari 300.000 kesempatan kerja di perkebunan hilang.²⁰ Tingkat pengangguran yang tinggi menjadikan banyak fenomena di dalam kehidupan masyarakat bermunculan. Kemamanan di wilayah perkebunan tebu semakin rendah, sedangkan tingkat kejahatan semakin tinggi, maka banyak munculnya pencurian. Kejahatan tidak hanya berupa pencurian, akan tetapi masyarakat di sekitar perkebunan juga sudah mengenal candu dan menggunakan. Kasus pencurian berhubungan dengan siklus kegiatan produksi pertanian masyarakat desa di wilayah perkebunan tebu. Ketika sedang musim panen padi dan palawija, jumlah pencurian relatif rendah. Hal yang sama juga ketika aktivitas perkebunan gula banyak menyerap tenaga kerja.²¹ Sementara itu, pada masa *paceklik*²², tingkat kriminalitas pencurian semakin meningkat.

Di bidang ekonomi perkebunan tebu selain menghidupi masyarakat Mangkunegaran juga menjadikan masyarakat Mangkunegaran sengsara. Pasalnya tanah yang dimiliki petani harus direlakan untuk ditanami tebu dengan sistem *glebagan*. Sistem *glebagan* adalah sistem yang dipakai oleh Praja Mangkunegaran pada tanah sewaan atau tanah penduduk Praja Mangkunegaran. Selain itu zaman melaise yang melanda juga mengakibatkan ekspor gula menurun, gula yang telah diproduksi tidak laku dijual dan harus disimpan di

²⁰Soegijanto Padmo, “Depresi 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda” dalam *Jurnal Humaniora*, hlm. 153.

²¹Wasino, *op.cit.*, hlm. 328.

²²Paceklik merupakan sebutan dari masyarakat Jawa untuk masasaat persediaan bahan pangan para petani dalam keadaan krisis sehingga harganya menjadi mahal. Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, *op.cit.*, hlm. xxxiv.

gudang-gudang penyimpanan. Gula yang tidak laku dijual di pasaran dunia selanjutnya di jual dengan harga murah.

E. Kesimpulan

Mangkunegaran merupakan kerajaan kecil atau kadipaten besar yang beribu kota di utara wilayah Kasunanan Surakarta. Pada saat kepemimpinan Mangkunegoro IV, beliau mendirikan PG Colomadu dan PG Tasikmadu. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan gula, Mangkunegoro IV menggunakan tanah miliknya dan beberapa lahan yang disewa dari Sunan. Tanah yang dulunya disewakan kepada pengusaha Swasta tidak diperpanjang masa sewanya dan lahan yang digarap oleh *bekel* juga diambil untuk dijadikan perkebunan tebu.

Pada masa pemerintahan Mangkunegoro VII, beliau melakukan subsidi terhadap perusahaan-perusahaan milik Praja Mangkunegaran termasuk PG Colomadu dan PG Tasikmadu. Subsidi yang dilakukan berupa perluasan wilayah perkebunan tebu. Perluasan wilayah dilakukan dengan menyewa tanah dari pihak Kasunanan Surakarta atau dengan menggunakan tanah rakyat dengan sistem *glebagan*. Pada awal pemerintahan Mangkunegoro VII bertakhta, perekonomian dunia dalam keadaan stabil, yang artinya setelah Perang Dunia I permintaan akan ekspor gula tidak mengalami kesulitan dan kendala yang berarti. Permintaan gula untuk di ekspor ke negara mengalami peningkatan, menjadikan penanaman tebu di berbagai wilayah baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa ditingkatkan. Perluasan lahan perkebunan tebu di perkebunan tebu Mangkunegaran mencapai puncaknya pada tahun 1929. Pada tahun 1929 PG Colomadu melakukan pemanenan tebu seluas 1187,47 ha perkebunan tebu. Dibandingkan dengan PG Colomadu, PG Tasikmadu memanen tebu seluas 2526,94 ha dan ditambah membeli tebu rakyat seluas 43,28 ha dengan total yang dipanen PG Tasikmadu seluas 2570,22 ha.

Tepat pada tahun 1929 terjadi krisis ekonomi di dunia yang juga berimbas di wilayah Hindia Belanda. Untuk mencegah keterpurukan industri gula di Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan diantaranya pengurangan lahan perkebunan tebu dan pengaturan ekspor gula dengan dikeluarkannya *Verbansuiker-Ordonnantie* (Ind. Stb. 1932 No. 643) yaitu pengaturan penjualan secara tunggal dibawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda dan ditunjuklah NIVAS untuk mengatur perdagangan gula di Hindia Belanda. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda ditanggapi oleh Mangkunegoro VII dengan mengurangi penanaman lahan perkebunan tebu. Lahan perkebunan yang dianggap tidak ekonomis tidak ditanami tebu. Gula-gula yang tersimpan di gudang-gudang penyimpanan tersebut selanjutnya dijual dengan harga murah.

Dampak yang menonjol dari krisis Malaise di Praja Mangkunegaran adalah banyak dari pekerja industri gula Mangkunegaran yang dipecat. Pengangguran yang terjadi dimana-mana dan dibarengi dengan terjadinya krisis malaise menyebabkan tingkat kriminalitas terutama pencurian semakin meningkat. Krisis malaise menjadikan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masyarakat menjadi miskin. Kemiskinan yang melanda juga ditambah dengan pajak yang dibebankan kepada rakyat masih tetap dan upah pekerja diturunkan hingga 50 persen menyebabkan rakyat semakin terpuruk. Keterpurukan rakyat ditengah krisis malaise menyebabkan banyak rakyat yang kelaparan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip Mangkonegara VII (Koleksi Mangkunegara). Berisi tentang peraturan gaji pegawai perkebunan, Surakarta: Rekso Pustaka.

Buku dan Artikel

Anonim, *Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Bidang Perekonomian*, Jakarta; KITLV bekerjasama dengan LIPI, 1978.

Diyah Wahyuningsih dan Septi Waryani, *Sejarah Perkebunan Gula Jawa Tengah*, Semarang: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2016.

Heri Wiryawan, *Mangkunegara VII dan Awal Penyiaran Indonesia*, Surakarta: Lembaga Pers dan Penyiaran Surakarta, 2011.

Mahesti Hasanah, *Ekonomi Politik Kolonialisme: Prespektif Kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Hindia Belanda dalam Mengelola Industri Gula Mangkunegaran Pada Tahun 1870 – 1930*, Yogyakarta: PolGov, 2015.

Mubyarto, dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta; Aditya Media, 1992.

Pringgadigdo, A.K, *Geschiedenis Der Ondernemingen Van Het Mangkoenagorosche Rijk*, a.b. Muhammad Husodo Pringgokusumo, *Sejarah Perusahaan-Perusahaan Kerajaan Mangkunegaran*, Solo: Rekso Pustoko- Mangkunegaran.

Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Sartono Kartodirjo, Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1994.

Soetomo Sisiwokartono, *Sri Mangkunegara IV Sebagai Penguasa dan Pujangga (1853-1881)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2006.

Soegijanto Padmo, “Depresi 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda” dalam *Jurnal Humaniora*.

Suhartono, *Apanage dan Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta: LKiS, 2008.

Skripsi

Sri Larasati, “Pengaruh Krisis Melaise terhadap Pabrik Gula Gondang Winangun Tahun 1929-1940”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2016.